

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa peneliti tentang Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pelalawan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan cukup baik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan juga sudah cukup baik. Keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan dapat dilihat dari :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan dilihat melalui kepuasan terhadap pelayanan diberikan. Dari penelitian yang dilakukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sudah dikatakan baik, hal ini di buktikan dengan penerapan pelayanan prima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah. Tujuan dari membangun *data base* yang baik adalah untuk mempermudah proses administrasi kependudukan dan mewujudkan tertib administrasi melalui jaringan komputerisasi dan berbasis internet.
2. Karakteristik pelaksana kebijakan, dapat diukur dari tiga poin yaitu komitmen kerja, kejujuran, dan sifat demokratis. Dari penelitian yang dilakukan bahwa komitmen kerja yang dipegang tentunya berdasarkan

aturan yang berlaku seperti Undang-Undang No 24 tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan administrasi kependudukan. Kejujuran diterapkan dalam hal sikap pegawai yang tunduk pada aturan tentang penerimaan biaya-biaya gelap yang ditengah masyarakat lebih dikenal dengan uang pelicin. Dan yang terakhir adalah sifat demokratis yang tinggi dengan tidak menutup apapun bentuk pendapat, kritik, masukan, yang membangun asalkan disampaikan secara sopan dan benar.

3. Sumber-sumber kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem informasi administrasi di Kabupaten Pelalawan adalah sumber daya manusia dan sumber daya modal. Faktor sumber daya menjadi faktor terkendalanya implementasi kebijakan karena masih terdapat banyaknya kelemahan-kelemahan seperti lemahnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang administrasi dan ahli dalam bidang komputer, cenderung kurangnya anggaran dalam perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Pelalawan.
4. Sikap para pelaksana kebijakan harus sesuai aturan dan norma yang berlaku, dan juga pembagian tugas masing-masing pelaksana kebijakan harus sesuai kemampuan dan bidangnya masing-masing sehingga tidak ada pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.
5. Proses komunikasi dan penyampaian informasi disampaikan pada sasaran yang tepat yaitu masyarakat. Informasi disampaikan dengan jelas kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat ditiap-tiap kecamatan dan juga di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

6. Lingkungan Eksternal sangat berpengaruh keberhasilan implementasi kebijakan administrasi kependudukan di kabupaten pelalawan seperti masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal yang baru diterapkan selama membawa dampak baik bagi masyarakat. Dan juga dukungan elit politik juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan administrasi kependudukan di kabupaten Pelalawan.

6.2. Saran

Demi pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pelalawan menjadi lebih baik kedepannya, penulis menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat diterima dengan baik. Harapan saya agar Kabupaten Pelalawan meningkatkan anggaran implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan sehingga pengadaan sarana dan prasarana penunjang dapat dipenuhi seperti jaringan internet di tiap kecamatan, perangkat computer, dan lain sebagainya. Saran lain juga agar pemerintah Kabupaten Pelalawan memperhatikan akses jalan penghubung ke Kecamatan agar urusan masyarakat ke Kecamatan terkait Administrasi Kependudukan bisa terlaksana dengan cepat dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan akses jalan lebih baik. Secara otomatis dengan akses jalan yang lebih baik pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar lebih meningkat.